

SOP – PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

PERWAL BANDUNG NO. 855, BD 2015/NO. 31

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 495 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

- ABSTRAK** : - Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015, namun dalam rangka optimalisasi kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu, maka Peraturan Walikota Bandung termaksud perlu diubah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 27 Tahun 2009; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2007; Perda Kota Bandung No. 22 Tahun 2009; Perwal Bandung No. 495 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Walikota ini terdapat perubahan dalam beberapa pasal. Antara lain penambahan huruf pada ketentuan Pasal 1, Pasal 7, perubahan pada ketentuan Pasal 7 huruf m, Pasal 11 ayat (1), Pasal 81, Pasal 86, Lampiran III dan IV, dan penambahan pasal pada Pasal 19.
- CATATAN** : - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 8 September 2015.
- Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 1171 Tahun 2013, Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13, Pasal 15, Pasal 18, dan Pasal 20 Peraturan Walikota Bandung Nomor 763 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Keputusan Walikota Bandung Nomor 503/Kep.1172-Bag.ORPAD/2013; Keputusan Walikota Bandung Nomor 660/Kep.051-BPLH/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan: -